



LEMBARAN KALURAHAN TEGALREJO  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Nomor : 6**

**Tahun 2025**

---

LURAH TEGALREJO  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEGALREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.3.8.1/52/KPTS/2025 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari tentang anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Tegalrejo tahun 2026 tanggal 29 Desember 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022  
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  20. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Tegalrejo Tahun 2026.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEGALREJO  
dan  
LURAH TEGALREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| a) Pendapatan Asli Kalurahan | : Rp. 53.660.000,00       |
| b) Transfer                  | : Rp. 2.969.223.200,00    |
| c) Pendapatan Lain-lain      | : <u>Rp. 8.490.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Kalurahan  | : Rp 3.031.373.200,00     |

2. Belanja Kalurahan :

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan           | : Rp. 1.158.183.200,00        |
| b. Bidang Pembangunan Kalurahan                            | : Rp. 1.347.408.335,00        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                         | : Rp. 117.920.000,00          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan                | : Rp. 18.085.000,00           |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana dan<br>Mendesak Kalurahan | : Rp. 110.276.665,00          |
| Jumlah Belanja Kalurahan                                   | : <u>Rp. 2.751.873.200,00</u> |
| Defisit  | : Rp (279.500.000,00)         |

3. Pembiayaan Kalurahan :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp 85.000.000,00 |
|--------------------------|--------------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| b. Pengeluaran Pembiayaan      | : Rp 364.500.000,00   |
| Selisih Pembiayaan (a-b)       | : (Rp 279.500.000,00) |
| Silpa tahun anggaran berkenaan | : Rp. 0,00            |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Tegalrejo dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Tegalrejo  
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH TEGALREJO,

ttd

( SARJONO )

Diundangkan di Tegalrejo  
pada tanggal 30 Desember 2025  
SARJONO, LURAH TEGALREJO,



(SUGIYANTO)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK  | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | 2                                     | 3                       | 4          |
| <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                  | 53.660.000,00           |            |
| 4.2.      | Pendapatan Transfer                   | 2.969.223.200,00        |            |
| 4.3.      | Pendapatan Lain-lain                  | 8.490.000,00            |            |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>3.031.373.200,00</b> |            |
| <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                       | 825.492.300,00          |            |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa               | 825.284.400,00          |            |
| 5.3.      | Belanja Modal                         | 990.819.835,00          |            |
| 5.4.      | Belanja Tidak Terduga                 | 110.276.665,00          |            |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.751.873.200,00</b> |            |
|           | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>279.500.000,00</b>   |            |
| <b>6.</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.      | Penerimaan Pembiayaan                 | 85.000.000,00           |            |
| 6.1.1.    | SILPA Tahun Sebelumnya                | 85.000.000,00           |            |
| 6.2.      | Pengeluaran Pembiayaan                | 364.500.000,00          |            |
| 6.2.2.    | Penyertaan Modal Desa                 | 364.500.000,00          |            |
|           | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>(279.500.000,00)</b> |            |
|           | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

TEGALREJO, 23 Desember 2025

LURAH

ttd

SARJONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |           | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA    |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|---------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                              | 5             |
|               | <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>  |                                |               |
|               | 4.1.      | Pendapatan Asli Desa   | 53.660.000,00                  |               |
|               | 4.2.      | Pendapatan Transfer  | 2.969.223.200,00               |               |
|               | 4.3.      | Pendapatan Lain-lain   | 8.490.000,00                   |               |
|               |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>3.031.373.200,00</b>        |               |
|               | <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>   |                                |               |
| <b>1</b>      |           | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                              | <b><u>1.158.183.200,00</u></b> |               |
| <b>1.1.</b>   |           | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> | <b>1.045.146.100,00</b>        |               |
| 1.1.01        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 47.710.000,00                  | ADD           |
| 1.1.01        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 47.710.000,00                  |               |
| 1.1.02        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 694.145.350,00                 | ADD           |
| 1.1.02        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 694.145.350,00                 |               |
| 1.1.03        |           | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 44.855.590,00                  | ADD           |
| 1.1.03        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 44.855.590,00                  |               |
| 1.1.04        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)            | 105.108.500,00                 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 105.108.500,00                 |               |
| 1.1.05        |           | Penyediaan Tunjangan BPD   | 38.781.360,00                  | ADD, PAD      |
| 1.1.05        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 38.781.360,00                  |               |
| 1.1.06        |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.868.000,00                   | ADD           |
| 1.1.06        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 5.868.000,00                   |               |
| 1.1.07        |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 43.977.300,00                  | ADD, PAD      |
| 1.1.07        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 43.977.300,00                  |               |
| 1.1.08        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa               | 64.700.000,00                  | DDS           |
| 1.1.08        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 64.700.000,00                  |               |
| <b>1.2.</b>   |           | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                               | <b>39.711.200,00</b>           |               |
| 1.2.01        |           | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                            | 1.450.000,00                   | PBP           |
| 1.2.01        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 1.450.000,00                   |               |
| 1.2.02        |           | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa  | 8.441.200,00                   | ADD           |
| 1.2.02        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 8.441.200,00                   |               |
| 1.2.90        |           | Pengadaan Peralatan Kerja  | 25.120.000,00                  | PBH           |
| 1.2.90        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 18.620.000,00                  |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|--------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                              | 5          |
| 1.2.90        | 5.3. | Belanja Modal   | 6.500.000,00                   |            |
| 1.2.94        |      | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                                   | 4.700.000,00                   | ADD        |
| 1.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.700.000,00                   |            |
| <b>1.3.</b>   |      | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> | <b>12.550.000,00</b>           |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                 | 12.550.000,00                  | PBP        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 12.550.000,00                  |            |
| <b>1.4.</b>   |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>     | <b>58.050.000,00</b>           |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                 | 9.320.000,00                   | ADD, PAD   |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 9.320.000,00                   |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)               | 5.500.000,00                   | ADD        |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.500.000,00                   |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                              | 8.900.000,00                   | PAD        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 8.900.000,00                   |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                   | 12.220.000,00                  | ADD, PBH   |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 12.220.000,00                  |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                 | 7.895.000,00                   | PBH        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 7.895.000,00                   |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa  | 4.215.000,00                   | PBP        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.215.000,00                   |            |
| 1.4.95        |      | Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam   | 10.000.000,00                  | PBH        |
| 1.4.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.000.000,00                  |            |
| <b>1.5.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>  | <b>2.725.900,00</b>            |            |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)   | 2.725.900,00                   | PBH        |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.725.900,00                   |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                       | <b><u>1.347.408.335,00</u></b> |            |
| <b>2.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>  | <b>43.200.000,00</b>           |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)  | 43.200.000,00                  | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 43.200.000,00                  |            |
| <b>2.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>   | <b>241.138.500,00</b>          |            |
| 2.2.01        |      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)        | 39.600.000,00                  | DDS        |
| 2.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 39.600.000,00                  |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)              | 175.112.500,00                 | DDS, PBP   |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 175.112.500,00                 |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan  | 9.294.000,00                   | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 9.294.000,00                   |            |
| 2.2.05        |      | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa  | 4.240.000,00                   | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                            | 5          |
| 2.2.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.240.000,00                 |            |
| 2.2.06        |      | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)  | 8.249.000,00                 | DDS        |
| 2.2.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 8.249.000,00                 |            |
| 2.2.91        |      | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)   | 3.038.000,00                 | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.038.000,00                 |            |
| 2.2.96        |      | Pembinaan dan pengembangan Kampung KB   | 1.605.000,00                 | DDS        |
| 2.2.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.605.000,00                 |            |
| <b>2.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   | <b>987.619.835,00</b>        |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)                 | 936.399.200,00               | DDS        |
| 2.3.11        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00                 |            |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal   | 935.199.200,00               |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)                | 51.220.635,00                | DDS        |
| 2.3.14        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.100.000,00                 |            |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal   | 49.120.635,00                |            |
| <b>2.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>   | <b>75.450.000,00</b>         |            |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN                     | 45.000.000,00                | PAD        |
| 2.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 45.000.000,00                |            |
| 2.4.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)                    | 0,00                         | PAD        |
| 2.4.14        | 5.3. | Belanja Modal   | 0,00                         |            |
| 2.4.91        |      | Pemberian stimulan jamban sehat   | 30.450.000,00                | PBP        |
| 2.4.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 30.450.000,00                |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>   | <b><u>117.920.000,00</u></b> |            |
| <b>3.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                     | <b>2.800.000,00</b>          |            |
| 3.1.03        |      | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa                 | 2.800.000,00                 | DDS        |
| 3.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.800.000,00                 |            |
| <b>3.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>  | <b>91.400.000,00</b>         |            |
| 3.2.02        |      | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)            | 18.440.000,00                | DDS        |
| 3.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 18.440.000,00                |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 38.800.000,00                | DDS        |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 38.800.000,00                |            |
| 3.2.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan  | 34.160.000,00                | PBP        |
| 3.2.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 34.160.000,00                |            |
| <b>3.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>   | <b>2.770.000,00</b>          |            |
| 3.3.93        |      | Operasional Karang Taruna   | 2.770.000,00                 | DDS        |
| 3.3.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.770.000,00                 |            |
| <b>3.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>  | <b>20.950.000,00</b>         |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                            | 5          |
| 3.4.02        |      | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD   | 5.520.000,00                 | ADD        |
| 3.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.520.000,00                 |            |
| 3.4.92        |      | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa) | 7.500.000,00                 | DDS        |
| 3.4.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 7.500.000,00                 |            |
| 3.4.96        |      | Operasional PKK   | 7.930.000,00                 | ADD        |
| 3.4.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 7.930.000,00                 |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                  | <b><u>18.085.000,00</u></b>  |            |
| <b>4.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                    | <b>3.600.000,00</b>          |            |
| 4.2.92        |      | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan                                 | 3.600.000,00                 | DDS        |
| 4.2.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.600.000,00                 |            |
| <b>4.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                         | <b>12.990.000,00</b>         |            |
| 4.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa             | 12.990.000,00                | PBP        |
| 4.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 12.990.000,00                |            |
| <b>4.6.</b>   |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                                    | <b>1.495.000,00</b>          |            |
| 4.6.02        |      | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)        | 1.495.000,00                 | DDS        |
| 4.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.495.000,00                 |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>          | <b><u>110.276.665,00</u></b> |            |
| <b>5.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                                      | <b>30.376.665,00</b>         |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana   | 30.376.665,00                | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 30.376.665,00                |            |
| <b>5.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>   | <b>700.000,00</b>            |            |
| 5.2.00        |      | Penanganan Keadaan Darurat  | 700.000,00                   | PAD        |
| 5.2.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 700.000,00                   |            |
| <b>5.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>  | <b>79.200.000,00</b>         |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak   | 79.200.000,00                | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 79.200.000,00                |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>   | <b>2.751.873.200,00</b>      |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | <b>279.500.000,00</b>        |            |
| <b>6.</b>     |      | <b>PEMBIAYAAN</b>   |                              |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan   | 85.000.000,00                |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan  | 364.500.000,00               |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>   | <b>(279.500.000,00)</b>      |            |

| KODE REKENING |   | URAIAN                         | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 1             | 2 | 3                              | 4             | 5          |
|               |   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00          |            |

TEGALREJO, 23 Desember 2025

LURAH

ttd

SARJONO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦩꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863  
Laman [gedangsari.gunungkidulkab.go.id](http://gedangsari.gunungkidulkab.go.id); Posel [gedangsari@gunungkidulkab.go.id](mailto:gedangsari@gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI  
NOMOR 100.3.8.1/ 52 /KPTS/ 2025  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO  
KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TEGALREJO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Gedangsari tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TEGALREJO TAHUN ANGGARAN 2026

**KESATU :** Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 3.030.673.200,00 dengan perincian

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa     | : Rp. 52.960.000,00       |
| 2. Transfer                 | : Rp. 2.969.223.200,00    |
| 3. Pendapatan Lain-lain     | : <u>Rp. 8.490.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Kalurahan | : Rp. 3.030.673.200,00    |

**II. BELANJA**

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.751.173.200,00 dengan perincian per Bidang :

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                 | : Rp. 1.169.218.200,00 |
| 2. Pembangunan Desa                                  | : Rp. 1.335.480.700,00 |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan                          | : Rp. 133.345.000,00   |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat                           | : Rp. 5.095.000,00     |
| 5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | : Rp. 108.034.300,00   |
| Jumlah Belanja Desa                                  | : Rp. 2.751.173.200,00 |
| Surplus/(Defisit)                                    | : Rp. 279.500.000,00   |

**III. PEMBIAYAAN**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 85.000.000,00         |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 364.500.000,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | : Rp. (279.500.000,00)      |

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gedangsari  
pada tanggal 29 Desember 2025  
PANEWU GEDANGSARI,



EKO KRISDIYANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI  
 NOMOR 100.3.8.1/ 52 /KPTS/ 2025  
 TENTANG  
 HASIL EVALUASI RANCANGAN  
 PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO  
 KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 KALURAHAN TEGALREJO TAHUN  
 ANGGARAN 2026

| No. | Aspek Evaluasi   | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi  | Keterangan   |
|-----|--|------------|-------|--|--|
|     |  | Ya         | Tidak |  |  |
| 1   | Aspek Legalitas dan Administratif  |            |       |  |  |
| 1.1 | Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap. | √          |       | Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim | Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:<br>a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi;<br>b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau<br>c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal.<br>d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan;<br>e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan;<br>f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan<br>g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan. |

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 1.2   | Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.  | √ |  | 1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi.<br>2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal | Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal. |
| 1.3   | Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan. | √ |  | 1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal.<br>2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.                 | Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.   |
| 1.4   | Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya   | √ |  | Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.  | Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.   |
| Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :   |   |   |  |   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap;</li> <li>2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu;</li> <li>3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan;</li> <li>4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ol> |   |   |  |   |   |

| No. | Aspek Evaluasi  | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi  | Keterangan  |
|-----|---|------------|-------|--|---|
|     |   | Ya         | Tidak |  |   |
| 2   | Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran   |            |       |  |   |
| 2.1 | Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal  | √          |       | - Perkal RKPKal  |   |
|     | Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada                             | √          |       | - Surat Pemerintah Kab. Gunungkidul perihal Pedoman penyusunan APBKal<br>- rancangan Perkal APBKal | Kelompok pendapatan :<br>- PAKal<br>- Pendapatan Transfer<br>- Pendapatan Lain-lain |
|     | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis   | √          |       | - data pendapatan kalurahan dan realisasinya   |   |
|     | Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah. | √          |       |  |   |
|     | Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis         | √          |       |  |   |
|     | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan   | √          |       |  |   |

|  |  |   |   |                |  |
|--|--|---|---|----------------|--|
|  | peraturan perundang-undangan   |   |   |                |  |
|  | Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan   | √ |   |                |  |
|  | Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)   |   | √ |                |  |
|  | Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk:<br>1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;<br>2. tunjangan dan operasional Bamuskal. | √ |   | Siskeudes 2026 | -Belanja Operasional 28,59%<br>-Belanja Non Operasional 71,41% |
|  | Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.   | √ |   |                |  |
|  | Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.   | √ |   |                |  |
|  | Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW   | √ |   |                |  |
|  | Apakah output kegiatan rasional dan terukur  | √ |   |                |  |
|  | Apakah program/kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.  | √ |   |                |  |
|  | Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi  | √ |   |                |  |
|  | Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD   | √ |   |                |  |
|  | Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan   | √ |   |                |  |
|  | Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ  | √ |   |                |  |
|  | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan   | √ |   |                |  |
|  | Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan  |   | √ |                |  |
|  | Apakah ada pos Pengeluaran   |   | √ |                |  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan  |   |  |  |  |
|  | Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ |  |  |  |
|  | Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya   | √ |  |  |  |
|  | Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya  | √ |  |  |  |
|  | Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.   | √ |  |  |  |

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan.
2. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
6. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih/kurang 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan,;
7. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
9. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
11. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa;
12. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GEDANGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦮꦺꦝꦒꦤꦶꦱꦫꦶꦫꦺꦠꦶꦩꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦺꦒꦭꦫꦺꦗꦺ

Jalan Curung Indah No. 113 Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul 55863  
email: tegalrejokuncoro@gmail.com

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEGALREJO  
DAN  
LURAH TEGALREJO  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TEGALREJO  
TAHUN 2025

NOMOR : 100-3-6/168/2025 (Lurah)

NOMOR : 100-12-1/5/XII/2025 (BPD)

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh lima bertempat di balai Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat paripurna pemerintah Kalurahan Tegalrejo dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tegalrejo dan telah menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan Kalurahan.

Adapun naskah Peraturan Kalurahan adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Demikian persetujuan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan ( Bamuskal) dan Lurah Tegalrejo.

Ketua Bamuskal  
  
ALLMUNAWAR  


Lurah Tegalrejo  
  
SARJONO  


DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO  
 DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEGALREJO DALAM RANGKA  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TEGALREJO TAHUN 2026

Hari : Senin

Tanggal : 16 Desember 2025

| No | Nama              | Jabatan  | Alamat    | Tanda Tangan |
|----|-------------------|----------|-----------|--------------|
| 1  | Sarjono           | Wakil    | Tegalrejo |              |
| 2  | Supriyanto        | Carik    | Pengulu   |              |
| 3  | Uli Kadenawar     | BP kal   | Tanjung   |              |
| 4  | Dalmarat          | Kanako   | Tanjung   |              |
| 5  | Wahim Prasetyo    | Dukuh    | Pengulu   |              |
| 6  | Suparna           | staf     | Ketelo    |              |
| 7  | Tulqiman          | Dukuh    | Ngipik    |              |
| 8  | Siti Pamungkas    | Bamuskal | Tanjung   |              |
| 9  | Slamet            | Dukuh    | Ketelo    |              |
| 10 | Fari Riyanto      | Dukuh    | Tanjung   |              |
| 11 | Nita Elu Saryanti | Pangrota | Candi     |              |
| 12 | Jumadi            | Bamuskal | Tegalrejo |              |
| 13 | Hesti             | Dukuh    | Cremes    |              |
| 14 | Sumedi            | Bamuskal | Tengklis  |              |
| 15 | Mustopa           | Bamuskal | Candi     |              |
| 16 | Suparmin          |          | Ngipik    |              |
| 17 | Supriyanto        |          | Gupit     |              |
| 18 | Kur Riyatin       |          | Hargosari |              |
| 19 | TRI WAHYU         |          | TREMPON   |              |
| 20 | Thi Watiwati      | Panarta  | CANDI     |              |
| 21 | TENTRUM           | DUKUH    | CANDI     |              |
| 22 | TRIYADI           | ULU-ULU  | CANDI     |              |
| 23 | Rustana           | staf     | CANDI     |              |
| 24 | Sarimin           | staf     | Hargosari |              |
| 25 | Fajar Prasetyo    | Dukuh    | Tegalrejo |              |
| 26 | Kha Febriana      |          | Tengklis  |              |

